

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iiyah di Indonesia*, Jakarta, IKAHI, 2008
- de Cruz, Peter., *Perbandingan Sistem Hukum (terjemahan dari Comparative Law in a Changing World)*, Bandung : Nusa Media 2010
- Didi Nazmi Yunas, *Konsep Negara Hukum*, Padang 1992
- Hasibuan, Fauzi Yusuf. (2002). *Strategi Penegakan Hukum*. Jakarta: Fauzie & Partners.
- Mastra Liba, *Kendala Penegakan Hukum*, Jakarta 2002
- Makmur, Syafrudin. (2014). *Peran Advokat dalam Penegakan Hukum Ekonomi di Indonesia*, Salam Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum.
- Mulyana W. Kusuma, *Tegaknya Supremasi Hukum*, Bandung 2001
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: KENCANA.
- Mujahidin, Ahmad. (2008). *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan*
- Normand Edwin Elnizar, *Gelar Sosialisasi, Peradi Siap Bantu MA Registrasi Advokat ke Sistem E-court*
- HR. Otje Salma dan Anton F. Susanto, "*Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka kembali*", Rafika Aditama, Bandung, 2015
- Jimly Asshiddiqie. *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Ind. Hill.Co. Jakarta:
- Ropaun Rampe, *Teknik Praktek Advokat*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001, hlm.12
- Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (jakarta PT.Raja Grafindo Persada, 2008)
- Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, cetakan pertama, Bina Cipta, Bandung, 1982
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2006) *Penelitian hukum normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Prasetyo, Aji. (2018, 30 September). *Polemik Syarat Berita Acara Sumpah di e-Court*

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

C. SUMBER LAINNYA

Cetak Biru (Blue Frint) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010-2035

Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018

Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Buku Panduan E-SKUM & ATR, Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2018, hlm. 3

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Panduan e-Court Panduan Pendaftaran Online untuk Pengguna Terdaftar, Electronics Justice System Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2018, h.3 dalam <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> diakses pada 28 September 2018

Ika Atikah, UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, Judul Skripsi Implementasi e-Court Dan Dampaknya Terhadap Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia

